

Tabel 1. Jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung  
Tahun Anggaran 2021s/d 2026

Uraian	Anggaran (Rp)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Operasi	4.810.061.065	4.785.122.295	4.920.403.834,78	5.143.322.884,18	5.413.839.651,12	5.669.678.190,05
Jumlah	4.810.061.065	4.785.122.295	4.920.403.834,78	5.143.322.884,18	5.413.839.651,12	5.669.678.190,05

### 3. Indikator kinerja utama

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan indikator kinerja utama yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026, IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Kinerja	Target Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	72,21	72,5	73	73,5	74	74,5
		Peningkatan Ketersediaan , Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	2.125	2.130	2.135	2.140	2.145	2.150
			Skor PPH	90,5	91,6	92	92,5	93,1	93,2
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	82	86	90	94	98
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	B	B	BB	BB	BB	BB
			Laporan Keuangan sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Untuk menilai kekurangan dan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memiliki esensi penting dalam evaluasi kinerja yang berdasarkan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasi visinya.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini:

NO	JUMLAH NILAI	KATA GORI	KET
1	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil	Sangat Berhasil
2	Nilai 70 < 85	Berhasil	Baik
3	Nilai 55 < 70	Cukup Berhasil	Cukup Berhasil
4	Nilai < 55	Kurang Berhasil	Kurang Berhasil

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan cara **“Maximize Target”** yaitu apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Pencapaian dari sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan gambaran umum indikator perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur dari masing- masing indikator dapat dilihat pada tabel 3 berikut :



Tabel 3. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketersediaan konsumsi Energi	2.135	- Semakin besar capaian keberhasilan konsumsi energy, maka semakin terpenuhinya konsumsi energy masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik. Diharapkan terjadinya penurunan konsumsi beras yang diimbangi konsumsi umbi-umbian.
2	Skor PPH	92	- Semakin besar capain skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
3	Indeks Pelayanan Instansi	86	- Semakin besar capaian skor Indeks Pelayanan maka tingkat pelayanan terhadap mutu pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula ( <i>Maximize Target</i> ).
4	Nilai SAKIP	BB	- Semakin besar realisasi Nilai LKJIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Kabupaten, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan semakin baik.
5	Nilai Laporan Keuangan	Sesuai	- Semakin besar realisasi Nilai Kinerja, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan semakin baik.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tingkat capaian **Target Outcome** masing-masing indikator kinerja

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Target Outcome Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)
1	Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	2.135	2.209	103,47
		Skor PPH	92	95	103,26
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,15	100,18

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur , 2023

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat sebagai berikut yaitu Secara umum diperoleh nilai Pencapaian Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, dapat dimasukkan ke dalam kategori Capaian Kinerja **Sangat Baik**. Penjelasan secara lengkap atas capaian indikator kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 .

### Target Kinerja Output

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks pelayanan instansi	86	86.15	100.18
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	2	2	100
1.1.2	koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok).	1	1	100
1.1.3	koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dok).	1	1	100



1.1.4	koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dok).	1	1	100
1.1.5	koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dok)	1	1	100
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	adalah Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja (Dokumen)	6	6	100
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	1	100
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah.	<b>100</b>	<b>97.73</b>	<b>97.73</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan PNS/ASN	22	21	95.45
1.2.2	Pelaksanaan Penata Usahaaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD(Dok)	12	12	100.00
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (Paket)	1	1	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan( Orang)	4	4	100
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyelesaian Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	3	3	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4	4	100
1.4.4	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	1	1	100
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	adalah Jumlah poran Fasilitas Kunjungan Tamu ( Laporan)	1	1	100

1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat (Laporan)	1	1	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	1	1	100
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100	100	100
1.7.1	kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit) .	11	11	100
1.7.2	kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (unit).	26	26	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit).	1	1	100
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	persentase penyediaan infrastruktur Pangan	78.57	113.33	144.24
2.1	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan .	100	107	106.67
2.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia (Unit)	15	17	113.333
2.1.4	Sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Pendukung Kemandirian (Dokumen)	1	1	100
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	skor PPH	92	95	103.26
		Konsumsi Energi	2,135	2,209.3	103.48
3.1	<b>Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</b>	Persentase ketersediaan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	100	100	100
3.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	25	25	100



3.1.2	Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	adalah Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya(Laporan)	1	1	100
3.1.3	Sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (Dokumen)	1	1	100
3.1.4	Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan	jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan (Unit)	8	8	100
3.2	<b>Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota</b>	persentase pengelolaan cadangan pangan.	100	100	100
3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	100
3.2.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	adalah Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/kota.(Ton)	11.00	11.00	100
3.2.3	Sub kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah gudang pangan pemerintah yang terpelihara (gudang).	1	1	100
3.3	<b>Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</b>	Persentase capaian target konsumsi pangan	100	100	100
3.3.1	Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan perkapita pertahun (Dokumen)	1	1	100
3.3.2	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ( Laporan) .	1	1	100
3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi Per kapita Per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantau dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun ( Laporan)	1	1	100
4	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase penanganan daerah rawan Pangan	95.7	66.67	69.67
4.1	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	persentase penyelesaian peta	100	100.0	100
4.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	100
4.2	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	100	100
4.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	100
5	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100



5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengawasan PSAT dan pangan lainnya .	100	100	100
5.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/kota ( Dokumen)	1	-	-

## Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

### 1.a Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Dibawah ini dapat dilihat tabel capaian keberhasilan Skor PPH tahun 2022- 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2022-2023

Uraian	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Skor PPH	91,6	93,3	92	95

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Skor PPH Konsumsi tahun 2023 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2022 dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2023		2026
	Target	Realisasi	Target
Skor PPH	92	95	93,2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2023 melebihi target capain target akhir Renstra tahun 2026, namun demikian kondisi saat ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, dimana masih tingginya konsumsi padi-padian, dan masih rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

- a) Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi
- b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan
- c) Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu
- d) Berbagai bentuk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap bahan pangan inferior.
- e) Belum optimalnya kerjasama antar OPD serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyusunan KIT dan modul penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik.
- b) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal
- c) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.



## 1.b Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/hari)

Konsumsi energy perkapita per hari adalah nilai pangan yang dikonsumsi per kapita tiap hari dengan satuan Kkal, dengan memperhatikan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan gizi /WNPG ke X tahun 2012 yaitu angka kecukupan energy /AKE 2.150 kkal/Kapita/hari .

Tabel 7. Perkembangan Konsumsi Energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Tahun 2022-2023

Uraian	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Ketersediaan Konsumsi Energi	2.130	2.346	2.135	2.209,3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur.

Berdasarkan tabel diatas konsumsi energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perkembangan konsumsi energi tahun 2022-2023 mengalami Penurunan sebesar 5,83% pertahun. Pada Tahun 2022 konsumsi energy masyarakat sebesar 2.346 kkal/Kap/hari dan menurun menjadi 2.209,3 Kkal/Kapita/hari pada tahun 2023.

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Konsumsi Energi pada tahun 2022 adalah 2.346 dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Perbandingan capaian Konsumsi energi/Kkal/Kapita/hari tahun 2021 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.

Uraian	2023		2026	Hasil Perbandingan
	Target	Realisasi	Target	
Ketersediaan Konsumsi Energi	2.135	2.209	2.150	99,30

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi konsumsi energi untuk tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2026 hal ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi pangan masyarakat .

## 2. Indeks Pelayanan Instansi

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Indeks pelayanan instansi sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Disamping itu data indeks pelayanan instansi akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu berupaya untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat ini baru dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 ini, dimana realisasi skor Indeks Kepuasan Masyarakat berada diangka **86,15** lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu diangka 86,00 atau dengan kata lain mutu pelayanan Dinas Ketahanan Pangan adalah "BAIK".

Survey ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui mutu pelayanan dan kinerja dengan harapan dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada unsur pelayanan yang nilainya masih kurang dan mempertahankan nilai yang cukup tinggi.

### B. REALISASI ANGGARAN

Analisis Akuntabilitas Keuangan tahun 2023 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Program, kegiatan dan Subkegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.822.928.558,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.704.412.262,- atau 97,54 % dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100 %. Adapun rincian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 9. Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan 2023

No	Uraian	Tahun 2023
1	Renstra	4.920.403.834,78
2	Pagu	4.822.928.558
3	Realisasi	4.704.412.262



Secara lengkap, pagu dan realisasi penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 per program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Jumlah dan Realisasi Penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2023

Program	Anggaran		Realisasi		Fisik (%)
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Persen	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.	3.794.124.577,-	78,67	3.698.248.978	97,47%	100%
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan	278.722.582,-	5,78	276.278.900	99,12%	100%
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	611.176.313,-	12,67	593.160.303	97,05%	100%
Penanganan Kerawanan Pangan	87.541.688,-	1,82	86.400.181	98,70%	100%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	51.363.398,-	1,06	50.323.900	97,98%	100%
<b>JUMLAH TAHUN 2023</b>	<b>4.822.928.558,-</b>	<b>100</b>	<b>4.704.412.262</b>	<b>97,54%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, pengukuran efisiensi diambil dari selisih antara persentase capaian fisik kegiatan dengan persentase realisasi penyerapan anggaran. Adapun kriteria penilaian evektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- Sangat Efektif : >100%
- Efektif : 90-100
- Cukup Efektif : 80% -90%
- Kurang Efektif : 60%-80%
- Tidak Efektif : < 60%

Tabel 11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

<i>PROGRAM</i>	<i>CAPAIAN FISIK (%)</i>	<i>PENYERAPAN ANGGARAN (%)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	100	97,47
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan	100	99,12
Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	97,05
Program Penanganan Kerawanan Pangan	100	98,70
Program Pengawasan Keamanan Pangan	100	97,98
Jumlah 2023	100	97,54

Dari tabel efisiensi penggunaan sumberdaya diatas dan dilihat dari kriteria penetapan efisiensi anggaran belanja, setelah dilakukan penghitungan dengan mengikuti formula diatas adalah 97,54. Dengan itu dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dapat memenuhi kriteria " Efektif antara capaian fisik kegiatan dengan penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

### C. PERBAIKAN PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2023 Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak melaksanakan perbaikan Perencanaan Kinerja.



## BAB IV PENUTUP

Secara ringkas dapat disampaikan dan dijelaskan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2023 telah merealisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan melalui Dana APBD II yang dituangkan dalam 5 (lima) program dan 13 (tiga belas kegiatan) dan 37 (tiga Puluh tujuh) subkegiatan dan telah mencapai target yang diharapkan. Realisasi sebesar Rp. **4.704.412.262,-** dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp4.822.928.558,-. Dari uraian diatas, capaian kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dana APBD II , secara umum dari misi yang sudah ditetapkan dalam Renstra telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengukuran kinerja pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang ditentukan. Keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh kesungguhan seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan program/kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Walaupun secara umum Pemerintah sudah mampu menyediakan pangan dan mendistribusikannya secara merata keseluruh daerah, sehingga pangan mudah dijangkau, tetapi belum menjadi jaminan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memenuhi kebutuhannya dalam jumlah jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, berimbang, aman dan halal, sebagaimana dimanatkan oleh peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, karena pada kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang tinggal didaerah rawan pangan yang belum mampu mengakses pangan. Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat yang sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan.

Muara Sabak,      Februari 2024  
Kepala Dinas,



**FAJAR ALAMSYAH,SE**

Pembina TK.I ( IV/b)

NIP. 19801122 200604 1 009